



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawaban Keberhasilan dan Kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic yang berdasarkan pada Renstra Tahun 2021 - 2026 serta untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, meskipun demikian kami menyadari bahwa masih banyak dijumpai tantangan dan permasalahan dalam pencapaian target, namun tetap diharapkan laporan ini bisa bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mampu meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Optimisme yang tinggi senantiasa dimiliki untuk meningkatkan kinerja di tahun – tahun yang mendatang, Semoga Laporan Lakip ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar dan semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan Perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 24 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M. M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670905 198811 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	2
D. Isu-Isu Strategis	8
BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Rencana Kinerja Tahunan	21
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Realisasi Keuangan	61
BAB. IV : PENUTUP	73
LAMPIRAN	
• PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
• RENCANA AKSI	
• RENCANA KERJA	
• CASCADING	
• SKP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Penyusunan LAKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, Renstra OPD, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama

(IKU) perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsip terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

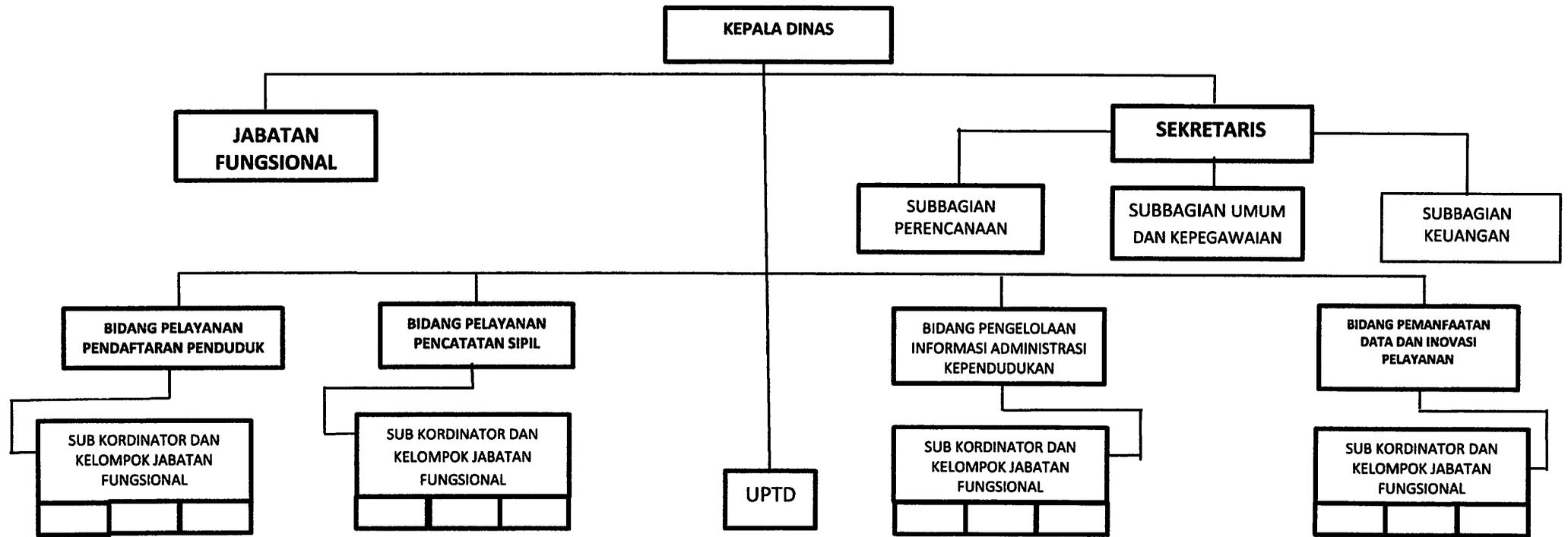
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Jabatan Fungsional.

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Color Ribbon dan Ribbon Evolis	Januari - Desember	119,450,000	Dokumen dan Barang	Tersedianya Pembelian Color Ribbon dan Ribbon Evolis
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian Barang-barang peralatan rumah tangga	Januari - Desember	4,000,000	Dokumen dan Barang	Tersedianya Pembelian barang-barang peralatan rumah tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Percetakan spanduk, banner dan karangan bunga	Januari - Desember	7,000,000	Dokumen	Tersedianya spanduk, banner dan karangan bunga
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Koran Harian Ujung Pandang Express, Berita Kota dan Radar Selatan	Januari - Desember	5,000,000	Dokumen	Terpenuhinya Langganan Koran ujung pandang expres
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi ke propinsi dan pusat	Januari - Desember	200,000,000	Dokumen	Tersedianya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian Kendaraan dinas roda dua	Januari - Desember	22,390,400	Dokumen dan Barang	Tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan
		Pengadaan Mebel	Pembelian meja dan kursi	Januari - Desember	7,300,000	Dokumen dan Barang	Tersedianya mebel berupa meja dan kursi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian CCTV, Laptop, AC, Printer	Januari - Desember	182,900,000	Dokumen dan Barang	Tersedianya CCTV, Laptop, AC, Printer
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keterpenuhan jasa surat menyurat	Januari - Desember	7,000,000	Dokumen	Terpenuhinya jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Fasilitasi penyediaan air. Listrik, internet dan TV kabel lokal	Januari - Desember	98,460,000	Dokumen	Terpenuhinya pembayaran tagihan air, listrik, internet dan TV kabel
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keterpenuhan honorarium PHL, supir, petugas kebersihan dan iuran	Januari - Desember	179,892,000	Dokumen	Tersedianya honorarium PHL, supir, petugas kebersihan dan iuran
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peremajaan Kendaraan Motor Dinas	Januari - Desember	29,460,000	Dokumen	Tersedianya Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Peremajaan Mobil Eselon II dan Mobil Operasional	Januari - Desember	78,900,000	Dokumen	Tersedianya Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Peremajaan peralatan dan mesin lainnya	Januari - Desember	9,500,000	Dokumen	Terpeliharanya AC, Laptop

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



2. Sumber Daya

2.1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sesuai kondisi per 31 Desember 2024 sebanyak 59 orang terdiri dari pejabat struktural berjumlah 9 Orang, fungsional khusus berjumlah 5 orang, fungsional umum berjumlah 7 orang dan Pegawai PPPK berjumlah 1 orang dan Pegawai Non ASN berjumlah 37 Orang dengan menurut Pangkat/Gol.Ruang dan jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Gol. Ruang
Per 31 Desember 2023

NO	Pangkat/Gol.Ruang	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Pegawai (ASN)
I	Golongan IV		
	IV/c	1	4,55
	IV/b	1	4,55
	IV/a	6	27,27
	Golongan III		
	III/d	4	18,18
	III/c	2	9,09
	III/b	3	13,64
	III/a	4	18,18
	Golongan II		
	II/d	1	4,54
	Jumlah	22	100

Sumber : Disdukpencahil Kepulauan Selayar Tahun 2024

Tabel 2.1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Per 31 Desember 2023

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir			
		S2	S1	D3	SMA
Pejabat Struktural	9	4	5		
Fungsional Khusus	5	2	3		
Fungsional Umum	7		4	1	2
PPPK	1		1		
Tenaga Kontrak	37	1	10		26
Jumlah	59	7	23	1	28

Sumber : Disdukpencaipil Kepulauan Selayar Tahun 2024

2.2. Sarana dan Prasarana

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Sarana dan prasarana

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		JUMLAH BARANG
		BAIK	RB/H	
1	Mobil	2	-	2
2	Sepeda Motor	12	2	14
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	1	1
4	Mesin Ketik Listrik	-	1	1
5	Lemari besi	8	-	8
6	Rak Besi	7	-	7
7	Brangkas	1	-	1
8	Mesin Absensi	1	-	1
9	Mesin Laminating	-	1	1
10	Mesin Potong KTP	-	1	1
11	Mesin Pemotong Rumput	-	1	1
12	Flasdisk	-	2	2
13	Hardiks	4	-	4
14	Signature Pad	3	-	3

15	Lemari Kayu	3	-	3
16	Kursi Besi	2	-	2
17	Kursi Kayu	2	-	2
18	Meja Rapat	1	-	1
19	Meja Panjang	1	-	1
20	Kursi Tamu	2	-	2
21	Meja 1 Biro	9	5	14
22	Meja ½ Biro	7	22	29
23	Kursi Rapat	-	1	1
24	Kursi Putar	-	22	22
25	Kursi Lipat	-	15	15
26	Meja Komputer	-	4	4
27	AC	10	9	19
28	Dispenser	1	-	1
29	Televisi	1	-	1
30	Kulkas	2	-	2
31	P.C Unit / Komputer PC	16	24	40
32	Laptop	24	12	36
33	Note Book	-	2	2
34	Monitor	-	6	6
35	Printer	13	33	46
36	Printer KIA	2	-	2
37	Printer KTP	4	-	4
38	Scanner	-	8	8
39	UPS	3	13	16
40	Peralatan Personal Komputer (Baterai UPS)	-	6	6
41	Server	3	3	6
42	Genset	-	6	6
43	Peralatan Jaringan lainnya	-	4	4
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	2
45	Meja kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2	5
47	Kursi kerja Pejabat Eselon V	-	4	4
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95	12	107
49	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	2	1	3
50	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2	2
51	Layar Film/Proyektor	-	1	1
52	Proyektor + attachment	1	-	1
53	Camera Eletronic	2	6	8
54	Handphone	1	-	1
55	Alat Mobile E-KTP Set	1	-	1
56	Scanner Iris Mata	1	-	1
57	Fingerprint	1	-	1
	Jumlah	254	234	488

D. Isu-Isu Strategis

Isu–isu strategis dibidang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi pemerintah dibidang penyelenggaraan adminduk (Undang–undang Nomor 23 tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 serta PP Nomor 41 Tahun 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan,berkesinambungan dan terus menerus melalui :
 - a. Penyediaan Aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem, yaitu SIAK Terpusat.
 - b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui system /online.
 - c. Penyediaan database penduduk yang lengkap,akurat dan up to date.
 - d. Penyediaan sumber daya manusia secara kuantitas (seleksi atas pegawai pindahan, penempatan pegawai sesuai luas wilayah/banyaknya pelayanan) dan kualitas (peningkatan pengetahuan/bimtek, penyegaran/rotasi, penempatan dengan kualitas SDM yang merata disetiap bidang/wilayah).
2. Proses Pengolahan Data dan pengaksesan data untuk kepentingan pemerintah ataupun penduduk/pemohon menjadi terbatas disebabkan karena beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dari SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat.
3. Pelayanan Identitas Kependudukan Digital.
4. Mekanisme/pola penyimpangan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat di akses melalui teknologi.
5. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.

6. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan Ekstrim dll).
8. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan publik serta tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, wajib di siapkan :Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang merupakan tolak ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya PRJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan. Adapun proses perumusan yang Panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan strategis langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global publik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis. Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

1. Visi

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun demi mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang akan dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian diatas serta memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, RPJPD tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, dan Rencana tata Ruang kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 - 2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, substansi RPJM Nasional 2020 – 2024, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah kabupaten kepulauan selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021 -2026 adalah :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

Dari rumusan visi ini terdapat 2 (Dua) pokok visi, yaitu :

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. ***Kawasan Timur Indonesia*** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan

barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) tahun RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan

melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Adapun misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

misi 1 “ **Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan** “, menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan

indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

Terkait pelaksanaan misi Bupati/Wakil Bupati tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah ditetapkan program seratus hari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

- Pembentukan Tim Layanan Administrasi Kependudukan Keliling.

- Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah “

- Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten
3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel A. 3.1.

Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Reviu

Tujuan Sebelum Reviu	Tujuan Setelah Reviu	Sasaran Sebelum Reviu	Sasaran setelah Reviu
Misi : 1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	a. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan b. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten c. Meningkatnya Kepercayaan masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel A. 3.2
TUJUAN DAN SARARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					KE				
					2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			33,89	55	64	68	73	76
		i. Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Persentase capaian kepemilikan identitas	73,25	74,33	75,83	76,17	77,33	78,5
		ii. Meningkatkan Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	kependudukan Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	73,85	88,46	94,23	94,23	95	100

		3.Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	n/a	72,6	73,6	74,6	75,6	76,6
			- Nilai Sakip Perangkat Daerah	64,53 (B)	66,74 (B)	67,69 (B)	69,82 (B)	72,45 (BB)	75,04 (BB)
			- Laporan Keuangan						
			- Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Renstra Disdukpencaipil 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD pada setiap tahun berjalan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 03/I/Disdukcapil Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Formulasi : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ Target : 88,46 %	Renstra
		5. Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Formulasi : Jumlah Data profil yang tersedia $\frac{\text{Jumlah Data profil yang tersedia}}{\text{Jumlah Data profil yang diolah}} \times 100 \%$ Target : 100 %	Renstra

C. Indikator Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD Tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya RKT Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target sasaran untuk tahun 2024 merupakan target tahun ketiga dari Renstra SKPD tahun 2021 – 2026 dan rencana kinerja sasaran memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	98 %
		2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	36 %
		3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	94,5 %
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	88,46 %
		2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan	100 %
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	74,6 %
		- Nilai Sakip Perangkat Daerah	69,82 (B)
		- Nilai Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Sesuai

Sumber : Renstra Disdukcapil 2021-2026

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja tahun 2024 memcerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya. Perjanjian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	98 %
		2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	36 %
		3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	94,5 %
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	88,46 %
		2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan	100 %

3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	74,6
----	---	---	------

Sumber : Renstra Disdukpencafil 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban Amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan gambaran mengenai tingkat Pencapaian target masing-masing Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra, maupun Rencana Kerja tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator Kinerja Sasaran Strategis dan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target kinerja yang diperjanjikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan Capaian Kinerja yang semakin baik, dengan perhitungan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja organisasi seperti yang dimaksudkan diatas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta meningkatnya akuntabilitas kinerja, maka disetiap instansi harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reuiu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Capaian Indikator Kinerja Utama
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Cakupan KTP-Elektronik	%	98	94,27	96,19
2.	Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	36	52,64	146,22
3.	Persentase Cakupan akta Pencatatan Sipil	%	94,5	98,23	103,95
4.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	88,46	62,96	71,17
5.	Persentase ketersediaan data Profil kependudukan	%	100	100	100
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	74,6	84,54	113,32

Sumber : Data Capaian Disduk Pencapil Tahun 2024

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada penjelasan tabel -tabel berikut ini :

B.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan

Capaian sasaran 1 : meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.1.1

**Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan**

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Rata-Rata Capaian sasaran terhadap Target 2024
					Target	Realisasi		
1	Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan	76,17 %	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	98	94,27	96,19	$\frac{96,19 + 146,22 + 103,95}{3} = 115,45$
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	36	52,64	146,22	
			Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	94,5	98,23	103,95	

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pada Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 98 % dengan realisasi hanya sebesar 94,27 % sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 96,19. Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2024 sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 36 % dengan realisasi sebesar 52,64 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 146,22 %. Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil adalah sebesar 98,23 % dari target 94,5 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 103,95 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan adalah sebesar 115,45 %. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kinerja maka capaian atas kepemilikan identitas kependudukan Tahun 2024 sudah termasuk dalam kriteria sangat baik dimana capaian sasarannya sudah melampaui target 76,17 % yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor-Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi target Penerbitan KTP-el adalah :

1. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pelayanan keliling di semua kecamatan baik daratan maupun kepulauan.
2. Belum semua masyarakat memahami akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan termasuk KTP-el.
3. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan inovasi jebol (Jemput Bola) ke lapangan.
4. Tersentralnya pengadaan keping KTP-el di pusat sehingga menghambat layanan kepemilikan KTP-el.
5. Kuantitas SDM yang belum memadai dan masih terbatas baik fungsional maupun personil yang ada di kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan mengingat beban kerja yang semakin bertambah sementara sumberdaya manusia sangat terbatas.
6. Kendala sistem (Gangguan Jaringan dan koneksi internet di MPP) dan gangguan teknis aplikasi SIAK.
7. Terbatasnya sarana elektronik maupun non elektronik yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.

Faktor-Faktor yang menentukan keberhasilan tercapainya realisasi target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penerbitan Akta Pencatatan Sipil adalah :

1. Adanya etos kerja dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.
2. Terlaksananya pelayanan keliling meskipun hanya di Kecamatan Kepulauan.
3. Adanya Inovasi yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dalam hal ini KK, KIA dan Akta Kelahiran.
4. Masyarakat sudah memahami akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran dimana digunakan anak saat sudah memasuki usia sekolah dan bisa digunakan dalam semua pelayanan public.
5. Dinas Kependudukan menggunakan 3 pintu dalam pelayanan yakni di kantor Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil, di Mall Pelayanan Publik dan Pelayanan secara Online.

Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Tabel B.1.2
Data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP DKB	PROGRES REKAM	PROGRES BELUM REKAM	PERSENTASE PEREKAMAN
1	2	3	4	5	6	7
1	BENTENG	24.378	18.017	17.118	899	95,01
2	BONTOHARU	15.489	11.327	11.034	293	97,41
3	BONTOMATENE	13.522	10.690	10.288	402	96,24
4	BONTOMANAI	14.079	10.695	10.293	402	96,24
5	BONTOSIKUYU	16.164	12.067	11.680	387	96,79
6	PASIMASUNGGU	9.433	6.928	6.298	630	90,91
7	PASIMARANNU	11.065	8.110	7.465	645	92,05
8	TAKA BONERATE	15.101	10.555	9.273	1282	87,85
9	PASILAMBENA	8.722	6.111	5.531	580	90,51
10	PASIMASUNGGU TIMUR	8.218	6.260	5.834	426	93,19
11	BUKI	6.925	5.316	5.188	128	97,59
JUMLAH		143.096	106.076	100.002	6.074	94,27

2. Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel B.1.3
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	USIA 0-17 TAHUN		JUMLAH ANAK USIA 0-17 TAHUN	MEMILIKI		JUMLAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI		JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	BENTENG	3.262	3.099	6.361	1.694	1.693	3.387	1.568	1.406	2.974	53,25
2	BONTOHARU	2.174	1.988	4.162	1.198	1.129	2.327	976	859	1.835	55,91
3	BONTOMATENE	1.472	1.360	2.832	1.009	963	1.972	463	397	860	69,63
4	BONTOMANAI	1.796	1.587	3.383	1.165	1.075	2.240	631	512	1.143	66,21
5	BONTOSIKUYU	2.138	1.959	4.097	1.036	1.048	2.084	1.102	911	2.013	50,87
6	PASIMASUNGGU	1.301	1.204	2.505	682	599	1.281	619	605	1.224	51,14
7	PASIMARANNU	1.488	1.467	2.955	716	785	1.501	772	682	1.454	50,80
8	TAKA BONERATE	2.363	2.182	4.545	947	988	1.935	1.416	1.194	2.610	42,57
9	PASILAMBENA	1.329	1.282	2.611	305	309	614	1.024	973	1.997	23,52
10	PASIMASUNGGU TIMUR	1.028	930	1.958	533	454	987	495	476	971	50,41
11	BUKI	867	742	1.609	618	539	1.157	249	203	452	71,91
JUMLAH		19.218	17.800	37.018	9.903	9.582	19.485	9.315	8.218	17.533	52,64

3. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel B.1.4
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH ANAK UMUR 0-17 TAHUN	MEMILIKI		JUMLAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI		JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSENTASE KEPEMILIKAN
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	BENTENG	3.496	3.337	6.833	3.320	3.201	6.521	176	136	312	95,43
2	BONTOHARU	2.331	2.140	4.471	2.224	2.059	4.283	107	81	188	95,80
3	BONTOMATENE	1.610	1.470	3.080	1.554	1.428	2.982	56	42	98	96,82
4	BONTOMANAI	1.929	1.696	3.625	1.871	1.653	3.524	58	43	101	97,21
5	BONTOSIKUYU	2.293	2.103	4.396	2.192	2.030	4.222	101	73	174	96,04
6	PASIMASUNGGU	1.410	1.304	2.714	1.285	1.205	2.490	125	99	224	91,75
7	PASIMARANNU	1.601	1.554	3.155	1.477	1.449	2.926	124	105	229	92,74
8	TAKA BONERATE	2.552	2.329	4.881	2.119	2.022	4.141	433	307	740	84,84
9	PASILAMBENA	1.432	1.386	2.818	1.248	1.204	2.452	184	182	366	87,01
10	PASIMASUNGGU TIMUR	1.119	1.024	2.143	998	933	1.931	121	91	212	90,11
11	BUKI	932	796	1.728	906	777	1.683	26	19	45	97,40
JUMLAH		20.705	19.139	39.844	19.194	17.961	37.155	1.511	1.178	2.689	93,25

4. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan

Tabel B.1.5
Data Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Non Muslim
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA PERKAWINAN	PERSENTASE (%)
1	2	4	5	6
1	BENTENG	3	3	100
2	BONTOHARU	-	-	-
3	BONTOMATENE	-	-	-
4	BONTOMANAI	-	-	-
5	BONTOSIKUYU	1	1	100
6	PASIMASUNGGU	-	-	-
7	PASIMARANNU	-	-	-
8	TAKA BONERATE	-	-	-
9	PASILAMBENA	-	-	-
10	PASIMASUNGGU TIMUR	-	-	-
11	BUKI	-	-	-
JUMLAH		3	3	100

5. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian

Tabel B.1.5
Data Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Non Muslim
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA PERCERAIAN	PERSENTASE (%)
1	2	4	5	6
1	BENTENG	2	2	100
2	BONTOHARU	-	-	-
3	BONTOMATENE	-	-	-
4	BONTOMANAI	-	-	-
5	BONTOSIKUYU	-	-	-
6	PASIMASUNGGU	-	-	-
7	PASIMARANNU	-	-	-
8	TAKA BONERATE	-	-	-
9	PASILAMBENA	-	-	-
10	PASIMASUNGGU TIMUR	-	-	-
11	BUKI	-	-	-
JUMLAH		2	2	100

6. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Tabel B.1.6
Data Kepemilikan Akta Kematian
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2023

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN YANG DILAPORKAN			JUMLAH KEMATIAN YANG TERBITKAN			%
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	BENTENG	100	66	166	100	66	166	100
2.	BONTOHARU	33	27	60	33	27	60	100
3.	BONTOMATENE	31	27	58	31	27	58	100
4.	BONTOMANAI	45	39	84	45	39	84	100
5.	BONTOSIKUYU	28	26	54	28	26	54	100
6.	PASIMASUNGGU	12	4	16	12	4	16	100
7.	PASIMARANNU	33	16	49	33	15	48	97,96
8.	TAKABONERATE	13	13	26	13	13	26	100
9.	PASILAMBENA	11	8	19	10	8	18	94,74
10.	PASIMASUNGGU TIMUR	13	4	17	13	4	17	100
11.	BUKI	21	16	37	21	16	37	100
TOTAL		340	246	586	339	245	584	99,66

Tabel B.1.7

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 pada sasaran meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2024	Indikator Kinerja	2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan	76,17 %	Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	97%	92,77%	95,64%	98 %	94,27 %	96,19 %
			Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)	35%	54,08%	154,51 %	36 %	52,64 %	146,22 %
			Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil	94%	86,96%	92,51%	94,5 %	98,23 %	103,95 %
Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran				114,22 %			115,45 %		

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. apaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) pada Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 98 % dengan realisasi hanya sebesar 94,27 % sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 96,19 %. Jika di dibandingkan dengan Capaian kinerja Tahun sebelumnya hanya sebesar 95,64 %. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun lalu meskipun realisasi belum memenuhi target.
2. Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2024 sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 36 % dengan realisasi sebesar 52,64 %, sehingga persentase capaian kerjanya sebesar 146,22 %. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 54,08 dari target 35 % sehingga capaian kerjanya sebesar 154,51 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi Tahun lalu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena terbatasnya ketersediaan Ribbon Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu pelayanan keliling yakni pelayanan langsung ke Sekolah – Sekolah sudah tidak dilakukan sejak 1 (Satu) Tahun yang lalu. Kedua hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran dalam pengadaan Ribbon Kartu Identitas

Anak (KIA) dan keterbatasan anggaran dalam melakukan pelayanan keliling ke Sekolah – Sekolah.

3. Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil adalah sebesar 98,23 % dari target 94,5 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 103,95 %. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan target sebesar 94 % dan realisasi sebesar 86,96 % dengan capaian kinerja sebesar 92,51 %, ini menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat realisasi maupun capaian kinerja yang signifikan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan pada periode tahun 2024 adalah sebesar 115,45 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 sebesar 76,17 %. Jika dibandingkan dengan Realisasi indicator sasaran Tahun 2023 sebesar 114,22 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya peningkatan capaian indicator sasaran sebesar 1,23 %. Dari tabel diatas dapat diketahui pula bahwa capaian persentase kepemilikan identitas kependudukan telah melampaui target setiap tahunnya yaitu sebesar 114,22 % pada tahun 2023 dan 115,38 % pada tahun 2024 yang artinya telah berhasil dengan tingkat capaian kinerjanya yang sangat baik. Akan tetapi masih ada 1 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI). Hal ini disebabkan karena keterbatasan pembiayaan/penganggaran pelayanan keliling di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan, dimana pelayanan keliling hanya dilakukan di 6 Kecamatan dari 11 Kecamatan yaitu hanya dilakukan di Kecamatan terjauh yakni Kecamatan Bontosikuyu (Bahuluang, Tambolongan dan Polassi), Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena. Selain itu beberapa sarana dan prasarana pelayanan sudah tidak memadai untuk digunakan dalam pelayanan.

Tabel B.1.8

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.909.000,-	211.096.800,-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.909.000,-	211.096.800,-	Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD	Baik
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1. Penataan Pendaftaran Penduduk	44.562.000,-	44.448.420,-		
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	44.562.000,-	44.448.420,-	Dokumen Kependudukan	Baik
		2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.960.000,-	196.955.000,-		

		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	196.960.000,-	196.955.000,-	Dokumen Kependudukan	Baik
3.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-		
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Baik
		Jumlah	495.071.000,-	493.925.620,-		

Sumber : DPA Disdukcapil Tahun 2024

Tabel B.1.9

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	Persentase Cakupan KTP-El.	%	98	94,27	96,19	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	211.909.000,-	211.096.800,-	99,62	
		Persentase Cakupan KIA	%	36	53,64	146,22	Program Pendaftaran Penduduk	241.522.000,-	241.403.420,-	99,95	
		Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil	%	94,5	98,23	103,95	Program Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-	99,48	
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					115,45	TOTAL PER SASARAN	495.071.000,-	493.925.620,-	99,77
		TINGKAT EFISIENSI -15,68									
TINGKAT EFEKTIFITAS 107,61											

Bila capaian kinerja optimal diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang disediakan maka dengan capaian kinerja pada sasaran OPD Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan adalah sebesar 115,45 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 495.071.000,-. Realisasi penggunaan anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 493.925.620,- atau 99,77 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.145.380 atau sebesar 17,58 % yang artinya bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar 99,77 % bisa untuk mewujudkan capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan. Berbanding lurus dengan tingkat efektifitas atas penggunaan anggaran dengan capaian kinerja dimana tingkat efektifitasnya adalah sebesar 107,61 %. Hal ini menggambarkan bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 493.925.620,-, cukup efektif untuk pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

Capaian sasaran 2 : Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.2.1

**Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten**

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran Terhadap Target 2024
					Target	Realisasi		
1	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	94,23 %	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	88,46	$\frac{17 \text{ OPD}}{27 \text{ OPD}} \times 100 \% = 62,96$	71,17	$\frac{71,17 + 100}{2} = 85,59$
			Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indicator pertama yakni persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah sebesar 62,96 % dari target 88,46 % dengan capaian sebesar 71,17 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indicator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan untuk indicator kinerja persentase ketersediaan data profil kependudukan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dengan realisasi sebesar 100 %, dengan demikian capaian realisasinya adalah sebesar 100 %.

Dari kedua indicator kinerja tersebut diatas maka dapat dihitung rata-rata capaian target Sasaran Persentase Capaian Pemanfaatan data Kependudukan Skala Kabupaten yaitu sebesar 85,59 % dari target 94,23 %. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.

Tabel B.2.2

Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

No	OPD Yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Tujuan Kerja Sama
1	Dinas Sosial	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Sosial
2	Dinas Perikanan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perikanan
3	Dinas Kesehatan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Kesehatan

4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	RSUD KH. Hayyung	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas RSUD KH. Hayyung
14	Badan Kesbangpol	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kesbangpol
15	Pengadilan Agama Selayar Kelas II	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas kantor Pengadilan Agama
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)
17	Kecamatan Bontomatene	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Kecamatan Bontomatene

Tabel B.2.3

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2023 dan 2024 pada sasaran meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2024	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	94,23 %	Persentase Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	76,92	61,54	80,01	88,46	62,96	71,17
			Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran					88,52 %			85,59 %		

Berdasarkan data perbandingan pada tabel B.2.3 maka dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2024 terdapat 16 Unit OPD dari 27 OPD dan 1 Unit Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan menggunakan data kependudukan atau sebesar 62,96 % dari target 88,46 % dengan capaian sebesar 71,17 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi atas indikator kinerja pertama belum mencapai target yang tertera pada Renstra 2021 – 2026, sama halnya dengan capaian indikator kinerja pada Tahun 2023 bahwasanya persentase jumlah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama belum tercapai dimana realisasinya hanya sebesar 61,54 % dengan target pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah 76,92 % sehingga capaian targetnya adalah sebesar 80,01 %.
2. Kemudian realisasi pada Indikator Kinerja persentase ketersediaan data profil kependudukan baik untuk Tahun 2023 maupun Tahun

2024 sudah mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan dalam renstra 2021-2026 yaitu sebesar 100 %. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan data profil kependudukan sudah sangat baik.

3. Jika dilihat dari target sasaran Tahun 2024 yakni sebesar 94,23 % maka dapat diketahui bahwa target sasaran meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten belum tercapai dimana rata rata capaian sasaran terhadap target hanya sebesar 85,59 %. Sama halnya pada Tahun 2023 dimana target sasarnya sebesar 94,23 % dengan realisasinya sebesar 88,52 %. Ini menunjukkan adanya penurunan capaian sasaran sebesar 2,93 %, hal ini disebabkan karena adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan terdapat perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data kependudukan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Selain itu penyebab menurunnya capaian kinerja sasaran disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.
4. Sejak Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengajukan izin PKS (Perjanjian Kerjasama) sebanyak 17 OPD dan 1 (Satu) Kecamatan dengan total 18 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun dari total 18 yang diusulkan tersebut baru 16 yang yang diberikan izin PKS (Perjanjian Kerjasama) dan 1 (Satu) Kecamatan namun baru 3 (Tiga) OPD yang telah diberi hak akses pemanfaatan data kependudukan. Akan tetapi dari ketiga OPD terdapat 2 (Dua) OPD yakni Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan sudah tidak bisa mengakses kembali data Dukcapil disebabkan karena berakhirnya masa perjanjian kerja sama sehingga perjanjian

kerjasama tersebut perlu diperbaharui untuk bisa mendapatkan user akses kembali dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar karena kecepatan dalam mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan tergantung dari respon Direktorat Jenderal Dukcapil. Akan tetapi secara berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus mengajukan permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD yang belum sama sekali mengajukan kerjasama maupun bagi OPD yang belum memperbaharui PKS (Perjanjian Kerjasama) sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel B.2.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatkan Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.825.000,-	20.470.387,-		
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	20.825.000,-	20.470.387,-	Terlaksananya penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan administrasi kependudukan	

		Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.374.000,-	17.316.600,-	Laporan Data Kependudukan	Baik
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20.000.000,-	19.907.000,-	Perjanjian Kerjasama dengan OPD terkait	Baik
3.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Profil Kependudukan	11.630.000,-	11.412.400,-		
		Penyusunan Profil dan Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	11.630.000,-	11.412.400,-	Buku Profil Kependudukan	Baik
		Jumlah	69.829.000,-	69.106.387,-		

umber : DPA Disdukpencapil Tahun 2024

Tabel B.2.5

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	88,46	62,96	71,17	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	58.199.000,-	57.693.987,-	99,13	
		Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	11.630.000,-	11.412.400,-	98,13	
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					85,59	TOTAL PER SASARAN	69.829.000,-	69.106.387,-	98,97
		TINGKAT EFISIENSI 13,38									
		TINGKAT EFEKTIFITAS 92,28									

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran sebesar 98,17 % atau Rp. 69.106.387,- dari pagu anggaran Rp. 69.829.000,- hanya bisa mencapai target indicator kinerja sasaran sebesar 85,59 % atau tingkat efisiensinya adalah sebesar 13,38 %. Hal ini menunjukkan bahwa belum efisiennya pencapaian target indicator kinerja sasaran dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar 98,17 %. Ini menggambarkan belum efektifnya pencapaian target kinerja sasaran hanya dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 69.829.000,- dimana tingkat efektifitas untuk pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten hanya sebesar 92,28 %. Sehingga untuk Tahun berikutnya perlu adanya penambahan anggaran dan strategi dalam pencapaian target indicator kinerja sasaran.

B.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian sasaran 1 : meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.3.1
 Analisis Pencapaian Sasaran
 Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKM)	%	74,6	84,63	113,4
Rata-Rata Capaian Kinerja					113,45

Sumber : Hasil Kustoner Pelayanan Disdukpencaipil Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian indicator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencapatan sipil telah melewati target yang telah ditentukan yakni 84,54 % dari target 74,6 % sehingga capaiannya sebesar 113,45 %. Hal ini menggambarkan bahwa bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi meskipun demikian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetap melakukan perbaikan kedepannya sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada penerima layanan yaitu masyarakat. Data Pendukung Capaian Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut adalah :

Tabel B.3.2
Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat

No	Jenis Kelamin	Umum (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan										Perbaikan
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
2	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
3	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	Perempuan	27	SMA	Swasta	4	3	3	3	3	3	4	3	4	
5	Perempuan	19	SMA	Wirausaha	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
6	Laki-laki	22	SMP	Pertukangan	4	3	4	3	4	4	4	4	4	
7	Perempuan	40	SMA	PNS	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
8	Perempuan	30	S1	Swasta	4	3	3	3	3	3	4	4	4	
9	Laki-laki	33	S1	Honoror	3	3	3	3	4	4	4	3	4	
10	Perempuan	29	SMA	URT	4	4	3	3	3	3	4	4	4	
11	Laki-laki	50	SMA	Wirausaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	Laki-laki	43	SMA	Kadus	4	4	3	3	4	3	4	3	4	
13	Perempuan	34	S1	PHL	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
14	Perempuan	30	S1	PPPK	4	4	3	3	4	3	4	3	4	
15	Perempuan	31	S1	Honoror	4	4	3	3	4	3	4	3	4	
16	Perempuan	36	S1	PNS	4	4	3	3	4	3	4	3	4	
17	Laki-laki	35	SMA	Swasta	4	1	3	4	4	4	4	4	4	
18	Laki-laki	27	SMP	Swasta	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
19	Laki-laki	20	SMA	Pelajar	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
20	Perempuan	17	SMP	Tidak ada	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
21	Laki-laki	46	S1	PNS	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
22	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	4	
23	Perempuan	18	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
25	Perempuan	26	S1	URT	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
26	Laki-laki	22	SD	Tidak ada	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
27	Perempuan	25	SMA	Staf Desa	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
28	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	4	4	4	4	
29	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	4	3	4	4	4	3	4	
30	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	2	4	3	4	
31	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
32	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	2	3	3	3	3	4	3	4	
33	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
34	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
35	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
36	Perempuan	40	SMA	URT	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
37	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	3	
38	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	4	
39	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	4	4	3	3	4	4	4	4	
40	Perempuan	17	SD	Tidak ada	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
41	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
42	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
43	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	Perempuan	19	SMA	Mahasiswa	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
45	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
46	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
47	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
48	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	4	4	3	4	

49	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	3
50	Laki-laki	28	SMA	PHL	4	4	3	4	4	4	4	3	4
51	Laki-laki	47	SMA	Wirusaha	3	3	2	3	3	3	4	3	4
52	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
53	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	3	3	3	3	3	4	3	4
54	Laki-laki	50	SD	Petani	4	4	3	3	3	3	4	3	4
55	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
56	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	3	4	3	4	4	3	4
58	Perempuan	20	SMA	Pelajar	4	3	3	4	4	3	4	3	3
59	Laki-laki	35	SMA	Wirusaha	3	3	3	3	4	3	4	3	4
60	Perempuan	21	SMP	Petani	4	3	3	3	4	4	4	3	4
61	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	4	4	3	4	4	4
62	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	2	3	4	4	3	4	3	4
63	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	2	3	3	3	4	3	4
64	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	4	4	3	3	3	4	3	4
65	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
66	Laki-laki	19	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
67	Laki-laki	19	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	2	4	4	4
68	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
69	Laki-laki	19	SMA	Siswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	4	3	3	3	3	4	3	3
71	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	4	3	3	3	3	4	3	4
72	Perempuan	17	SMP	Pelajar	4	2	3	1	3	3	4	4	4
73	Perempuan	43	SMA	Swasta	3	3	3	4	3	3	4	3	4
74	Laki-laki	51	SMA	Wirusaha	1	2	1	2	3	2	4	3	2
75	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	4	3	3	4	3	4
76	Laki-laki	40	SMA	Wirusaha	3	3	3	3	3	3	4	3	4
77	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	2	3	2	3	3	3	4	3	4
78	Laki-laki	36	SMK	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	3
79	Perempuan	42	SMA	URT	3	3	2	4	4	4	4	4	4
80	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	2	4	4	4	4	4	4
81	Laki-laki	53	SMA	Wirusaha	2	2	1	2	3	2	4	3	4
82	Laki-laki	35	SMA	Wirusaha	2	2	2	2	3	2	4	3	3
83	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	3
84	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	4
85	Perempuan	25	SMA	Honoror	3	4	3	3	4	4	4	4	4
86	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	4
87	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
88	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
89	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	4	3	3	4	3	4	3	4
90	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	4	3	3	4	3	4
91	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	4	4	3	4	3	4
92	Laki-laki	50	S1	PNS	4	3	4	4	4	3	4	4	4
93	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	4	3	3	4	4	3	4	3	4
94	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	3	3	3	4	4	4	3	4
95	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	2	2	2	2	4	3	4	3	4
96	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	2	1	3	3	2	2	3	3
97	Laki-laki	46	S1	PNS	4	3	3	3	3	3	4	4	4
98	Laki-laki	25	SMA	Swasta	1	2	2	2	3	2	4	3	3
99	Laki-laki	40	SMA	Staf Desa	4	4	3	3	3	3	4	4	4
100	Perempuan	36	SMP	URT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
101	Perempuan	18	SMA	URT	3	3	3	3	4	4	4	3	4
102	Laki-laki	17	SMP	Tidak ada	3	3	2	3	3	3	4	3	4

103	Perempuan	19	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
104	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	4	4	4	4
105	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	4	4	3	4	3	4
106	Laki-laki	29	S1	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	3	4
107	Laki-laki	35	SMA	TNI	3	3	3	3	3	3	4	3	3
108	Perempuan	25	S1	PHL	3	4	4	4	4	4	4	4	4
109	Perempuan	24	SMA	Honoror	3	3	3	3	3	3	4	4	4
110	Laki-laki	51	SMA	Kepala Desa	3	3	3	3	3	3	4	3	4
111	Laki-laki	36	S1	Perangkat Desa	4	3	3	3	3	3	4	3	4
112	Perempuan	31	SMA	URT	3	3	4	4	4	3	4	3	4
113	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
114	Laki-laki	47	SMA	Tukang Kayu	3	3	3	3	3	3	4	3	4
115	Laki-laki	48	SMA	Nelayang	3	4	4	3	4	3	4	4	4
116	Perempuan	45	SMA	URT	3	3	3	4	4	3	4	4	4
117	Perempuan	26	S1	Guru Honoror	3	3	3	4	3	3	4	3	4
118	Perempuan	27	S1	Guru Honoror	3	3	3	4	4	3	4	4	4
119	Perempuan	50	SD	URT	4	4	4	4	4	3	4	3	4
120	Laki-laki	24	SMA	Wirausaha	3	4	4	3	4	3	4	3	4
121	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	3	3	3	2	4	3	4
122	Laki-laki	38	SI	Wirausaha	3	3	2	3	3	3	4	3	3
123	Perempuan	35	SMA	URT	3	3	3	4	4	2	4	3	4
124	Perempuan	29	S1	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
125	Perempuan	57	SMA	URT	3	3	3	3	4	4	4	3	4
126	Laki-laki	42	S1	Swasta	3	4	3	4	4	3	4	3	4
127	Laki-laki	31	S1	Pendamping Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
128	Laki-laki	26	SMA	Swasta	3	4	4	4	3	2	4	3	4
129	Perempuan	33	S1	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
130	Laki-laki	30	SMA	PHL	3	3	3	3	3	4	4	3	4
131	Perempuan	37	SI	Swasta	3	4	4	4	4	4	4	3	4
132	Laki-laki	42	SI	PNS	4	4	3	4	4	3	4	3	4
133	Laki-laki	43	S1	PNS	4	4	3	4	3	4	4	4	4
134	Perempuan	56	SMA	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
135	Perempuan	29	SMA	Staf Desa	4	3	3	4	4	3	4	3	4
136	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	4	3	4	3	4
137	Perempuan	19	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
138	Laki-laki	35	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	Perempuan	48	S1	PNS	3	3	4	4	4	3	4	3	4
140	Perempuan	38	S1	URT	4	3	3	3	4	3	4	3	4
141	Perempuan	32	SMA	URT	3	2	2	3	3	3	4	3	3
142	Laki-laki	35	SMA	Wirausaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4
143	Perempuan	37	SMA	URT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	Perempuan	40	SMA	URT	4	3	3	4	4	4	4	3	4
145	Laki-laki	31	S1	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	Perempuan	30	SMA	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	Perempuan	32	S1	Swasta	4	3	3	3	3	4	4	3	4
148	Perempuan	26	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
149	Laki-laki	30	SMP	Swasta	3	4	3	4	3	3	4	3	4
150	Perempuan	28	SMA	URT	3	3	3	3	3	2	4	3	4
151	Laki-laki	25	SMA	Kurir JNT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
152	Perempuan	25	S1	Swasta	4	4	3	3	4	3	4	3	4
153	Perempuan	33	SMA	URT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
154	Perempuan	40	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4

155	Laki-laki	30	SMA	Swasta	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
156	Perempuan	50	SMA	Wirusaha	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
157	Laki-laki	19	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
158	Perempuan	20	SMP	URT	3	3	2	3	3	3	4	3	4	
159	Perempuan	17	SMP	Pelajar	3	3	2	3	3	3	4	3	4	
160	Perempuan	33	SMA	Wirusaha	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
161	Laki-laki	40	SMA	Staf Desa	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
162	Perempuan	31	SMA	UTR	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
163	Perempuan	17	SMP	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
164	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
165	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	3	3	3	4	4	3	4	3	4	
166	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	3	3	3	4	4	4	3	4	
167	Laki-laki	18	SMA	Pelajar	4	2	3	4	3	3	4	3	4	
168	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
169	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
170	Perempuan	27	S1	Wirusaha	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
171	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	4	4	4	3	4	
172	Laki-laki	17	SMP	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
173	Laki-laki	32	SD	Penyelam	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
174	Laki-laki	17	SMP	Nelayang	3	3	3	3	4	4	4	3	4	
175	Perempuan	18	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
176	Perempuan	33	SMA	Perangkat Desa	3	4	3	3	3	3	4	4	4	
177	Perempuan	17	SMA	Pelajar	2	2	2	2	2	3	4	3	3	
178	Laki-laki	36	S1	Perangkat Desa	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
179	Laki-laki	43	S1	Wirusaha	3	3	3	3	3	3	4	3	4	
180	Perempuan	32	SMA	Swasta	3	2	3	3	3	3	4	4	4	
181	Laki-laki	29	S1	Swasta	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
182	Perempuan	27	SMA	URT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
183	Laki-laki	33	SMA	Wirusaha	4	3	4	4	3	2	4	3	2	
184	Perempuan	38	S1	PNS	3	4	3	3	3	3	4	3	3	
185	Perempuan	41	S1	PNS	4	3	3	4	4	3	4	3	3	
186	Laki-laki	37	S1	PNS	4	3	4	3	4	4	4	3	3	
187	Perempuan	45	SMA	Wirusaha	3	3	3	3	3	3	4	3	3	
188	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	4	3	3	2	4	3	4	
189	Laki-laki	45	S1	PNS	3	3	3	3	3	2	4	3	1	
190	Perempuan	23	SMA	URT	3	2	1	1	2	1	4	2	1	
191	Laki-laki	28	SMA	Perangkat Desa	3	3	3	3	3	1	4	1	1	
192	Perempuan	29	SMA	URT	3	3	3	3	3	1	4	3	3	
193	Perempuan	32	SMA	URT	3	3	2	3	3	3	4	4	3	
194	Laki-laki	26	SMA	Wirusaha	4	4	3	4	4	4	4	2	1	
195	Perempuan	40	SMP	URT	3	3	3	3	3	4	4	3	4	
196	Perempuan	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	2	4	3	3	
197	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	4	3	3	4	3	4	3	4	
198	Perempuan	27	SMA	Honoror	3	3	3	3	3	2	4	3	4	
199	Perempuan	30	SMA	URT	4	3	3	3	4	3	4	3	3	
200	Laki-laki	35	SMA	Swasta	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
201	Perempuan	45	SMA	URT	2	2	2	2	3	3	4	3	3	
	Jumlah				668	641	608	664	680	640	802	649	765	
	NRR/Unsur				3.323	3.189	3.025	3.303	3.383	3.184	3.990	3.229	3.806	
	NRR tertimbang/unsur				0.369	0.354	0.336	0.367	0.376	0.364	0.443	0.359	0.423	3.381
	84,54													

Keterangan :

- U1 – U9 = Unsur – Unsur Pelayanan
- NRR = Nilai Rata - Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Perunsur dibagi
- NRR Tertimbang Per Unsur = NRR Per Unsur x 1/9

NO	UNSUR SKM	NRR
1	Persyaratan	3,323
2	Prosedur Pelayanan	3,189
3	Waktu Penyelesaian	3,025
4	Biaya/Tarif	3,303
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,383
6	Kompetensi Pelaksana	3,184
7	Perilaku Pelaksana	3,990
8	Sarana dan Prasarana	3,229
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,806

IKM UNIT PELAYANAN (Hasil Konversi)	84,54	Baik
--	--------------	-------------

NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVEKSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT LAYANAN
1.0000 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.6000 – 3.0640	65.00 – 75.60	C	Kurang Baik
2.0641 – 3.5320	76.61 – 88.30	B	Baik
3.5324 – 4.0000	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 pada Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	73,6	88,65	120,45	74,6	84,54	113,32

Dari data perbandingan diatas maka diketahui bahwa realisasi IKM pada tahun 2023 adalah sebesar 88,65 dari target kinerja sasaran sebesar 73,6 % dengan capaian 120,45 % dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 84,54 dari target 74,6 dengan capaian sebesar 113,32 %. Ini menunjukkan bahwa target kinerja sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun demikian dengan melihat realisasi tahun 2024 maka dapat diketahui bahwa capaian realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan dalam kategori yang baik oleh Pengguna Layanan. Akan Tetapi menurut persepsi kami sebagai pelaksana layanan masih ada beberapa unsur layanan kependudukan yang sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain :

- a. Waktu Penyelesaian dengan Nilai NRR adalah (3.034)
- b. Kompetensi Pelaksana dengan Nilai NRR adalah (3.189)

Kedua unsur pelayanan tersebut sudah memenuhi Kinerja unit pelayanan dengan nilai Baik tetapi menurut kami masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui program/kegiatan antara lain :

- i. Waktu Penyelesaian
 - Penyediaan dan penambahan fasilitas pendukung sarana dan prasarana pelayanan dengan jaringan teknologi informasi yang menciptakan percepatan pelayanan.
 - Penempatan petugas yang mempunyai kompetensi dengan status petugas pelayanan yang melakukan pendekatan sikap, perhatian dan tindakan guna mewujudkan pelayanan yang baik.
- ii. Kompetensi pelaksana
 - Penambahan petugas pelayanan
 - Pengembangan pelaksana pelayanan melalui diklat/bimtek.
 - Penempatan Petugas Pelayanan yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel B.3.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,-	7.767.400,-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,-	7.767.400,-	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Survey Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Renja/Renstra dan Rencana Aksi)	Baik
		Jumlah	8.000.000,-	7.767.400,-		

Tabel B.3.5
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	74,6	84,54	113,32	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.000.000,-	7.767.400,-	97,09
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR			113,32	TOTAL PER SASARAN		8.000.000,-	7.767.400,-	97,09
TINGKAT EFISIENSI -16,23										
TINGKAT EFEKTIFITAS 105,21										

Dari tabel dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target indicator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 16,23 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- Realisasi penggunaan anggaran untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.767.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 232.600,- atau sebesar 16,23 %. Dengan demikian penggunaan anggaran sebesar 97,09 % bisa mewujudkan capaian indicator sasaran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berbanding lurus dengan tingkat efektifitasnya sebesar 105,21 % yang menunjukkan bahwa dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,-, cukup efektif untuk bisa mencapai target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

B.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan target nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tingkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Tingkat Nasional. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Standar nasional menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja utama.

Tabel B.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional
Terhadap Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi:			
		1 Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4 %	94,27%	94,84%
		2 Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun kurang 1 Hari	99 %	93,25 %	94,19%
		3 Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60 %	52,64 %	87,73 %
		4 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	15 OPD	17 OPD	113,33 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dengan Standar Nasional menunjukkan bahwa Indikator kinerja persentase perekaman dan pencetakan KTP Elektronik dan Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 Tahun serta Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) belum mencapai target nasional dengan realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik sebesar 94,27 % dari target 99,4 % dengan capaian sebesar 94,84 % dan realisasi cakupan Kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 Tahun sebesar 93,25 % dari target 99 % dengan capaian sebesar 94,19 % serta realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebesar 52,64 % dari target sebesar 60 % dengan capaian 87,73 %. Belum tercapainya ketiga indikator ini disebabkan karena tertalu tingginya target nasional yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sementara tidak ada dukungan anggaran dari Pusat baik DAK maupun APBN yang bisa mendukung terlaksananya pelayanan keliling maupun jemput bola ke penerima pelayanan baik di Kecamatan Daratan maupun di Kecamatan Kepulauan. Sementara dukungan anggaran

dari APBD sendiri sangat terbatas sehingga tidak dilaksanakannya pelayanan keliling yang bisa menjadi factor pendukung tercapainya target yang telah ditetapkan.

Sementara untuk indicator Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data telah melampaui target dari target nasional yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil dimana realisasi indicator kinerja Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data adalah sebesar 16 OPD dan 1 Kecamatan yang telah melakukan kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target nasional sebesar 15 OPD sehingga capaiannya adalah sebesar 113,33 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar untuk indikator ini sudah termasuk dalam kategori baik.

B.5. Inovasi Pelayanan yang Menunjang Peningkatan Pencapaian Target Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menunjang pencapaian target pelayanan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Layanan Adminduk melalui WhatsApp (LAKUWA) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp Disdukcapil dengan manfaat untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan.
2. Sejam Layanan Kelar (SELAYAR), dengan inovasi ini diharapkan pelayanan kepada Masyarakat semakin lebih baik, cepat mulai dari proses verifikasi berkas pemohon sampai pada penerbitan dokumen kependudukan melalui dukungan berkas yang sudah lengkap. Tujuan Inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, transparan dan gratis dan dapat menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Sedangkan manfaatnya adalah :

1. Bagi pemerintah :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi
 - b. Memiliki system pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat
 - c. Meningkatkan capaian dan target nasional yang telah diterapkan serta dapat meningkatkan kinerja organisasi
2. Bagi Masyarakat :
 - a. memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan
 - b. mempercepat pelayanan kepada Masyarakat
 - c. memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan

Adapun hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah :

 1. Proses pelayanan lebih mudah, lebih cepat, transparan dan gratis
 2. Meningkatkan cakupan penerbitan dokumen dan target nasional yang telah di tetapkan
 3. Dapat meningkatkan kinerja organisasi
3. Sistem Pelayanan Akta Kelahiran penduduk berbasis Desa Wisata (SELAYAR BISA) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat dalam Penerbitan Akta Kelahiran. Sedangkan manfaat dari inovasi ini adalah :
 1. Bagi Pemerintah :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - b. Memiliki system pelayanan penerbitan akta kelahiran yang lebih baik
 - c. Meningkatkan target kepemilikan akta kelahiran
 2. Bagi Masyarakat :
 - a. Memudahkan dalam pengurusan akta kelahiran
 - b. Percepatan dalam penyelesaian akta kelahiran
 - c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya akta kelahiran
4. Anak Lahir Membawa Akta kelahiran (ALAMAKKK) dengan nama link <https://bit.ly/ALAMAKDUKCAPIL> yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan manfaat sebagai berikut :
 - a. Masyarakat dapat terlayani langsung ke Rumah Sakit atau Puskesmas dan kecamatan

- b. Semakin memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan
 - c. Capaian target kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat
5. Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LACAK) yang bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Adminduk dalam bentuk pelayanan jemput bola dari pintu ke pintu oleh tim LACAK yang ditugaskan untuk menjemput dan mengantarkan dokumen hasil pelayanan guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dengan manfaat sebagai berikut :
- a. Memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan
 - b. Masyarakat dapat langsung terlayani dikediamannya masing - masing.
 - c. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat
 - d. Memberikan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.
6. Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis desa secara online (Pakaballo Desaku) yang bertujuan untuk peningkatan akses pelayanan administrasi di desa guna peningkatan layanan dengan mengakses link <http://bit.ly/PAKABALLODESAKU> sehingga masyarakat desa hanya perlu mengupload berkas melalui link tersebut tanpa harus dating ke kantor pelayanan Disdukcapil.

B.6. Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan penghargaan dari Lembaga Ombudsman RI yakni **“Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”** dengan nilai 81,77 yang berarti masuk dalam kriteria Zona Hijau atau Kualitas Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penerima layanan dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Realisasi Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. maka melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.867.181.000,- dan Realisasi Rp. 3.668.612.855,- dengan persentase mencapai 94.87 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi = RP. 3.554.586.000
- b. Belanja Modal = RP. 312.595.000

Adapun rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel C.1

Target Anggaran dan Kinerja, Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Output Kegiatan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	KINERJA		%	OUTPUT
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.514.190.000,-	3.316.677.648,-	94,38%	Persentase capaian kinerja :	Persentase capaian kinerja :	95,95%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
					70,53 %	67,67 %		
					Persentase capaian kinerja keuangan :	Persentase capaian kinerja keuangan :	101,97 %	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.616.000,-	48.719.100,-	98,19%	100%	100%	100%	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.366.000,-	15.174.300,-	98,75%	3 Dok	3 Dok	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen Renstra, Renja Pokok/Perubahan

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-	4.940.500,-	98,81%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen RKA SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,-	4.847.800,-	96,96%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000,-	4.837.800,-	96,76%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen DPA SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000,-	4.969.800,-	99,40%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6.250.000,-	6.181.500,-	98,90%	3 Lap	3 Lap	100%	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ)
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.767.400	97,09%	3 Lap	3 Lap	100%	Tersedianya Laporan SKM, Laporan Rencana Aksi dan Laporan Evaluasi Renja
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.453.596.400,-	2.308.043.844,-	95,00%	100%	100%	100%	Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun secara tepat akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.413.281.000,-	2.258.346.049,-	93,58%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.779.900	95,60%	12 Lap	12 Lap	100%	Terlaksanannya Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.239.400,-	10.632.100,-	94,60%	1 Lap	1 Lap	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.808.900	96,18%	2 Lap	2 Lap	100%	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksa
	e. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,-	4.823.000,-	96,46%	12 Lap.	12 Lap.	100%	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /triwulan/ Semesteran SKPD	14.076.000,-	14.016.800,-	99,58%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.808.000,-	230.947.700,-	99,62%	100%	100%	100%	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawalan ASN
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	4.000.000,-	3.951.100,-	98,78%	6 Paket	6 Paket	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penerangan Bangunan Kantor							
b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.780.000,-	8.779.800,-	99%	6 Paket	6 Paket	100%	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.120.000,-	7.120.000,-	100%	6 Dok	6 Dok	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.908.000,-	211.096.800,-	99,62%	12 Lap	12 lap.	100%	Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD
4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	9.990.000	99,90%	100 %	100 %	100%	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian ASN
a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	4.993.000	99,86%	12 lap	12 lap	100%	Tersedianya dan tersusunnya laporan administrasi pegawai
5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.921.000	4.751.000	96,55%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah sebagai penunjang pelayanan
a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	4.921.000	4.751.000	96,55%	4 Lap	4 Lap	100 %	Tersedianya laporan barang milik daerah

	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.000.000,-	324.327.700,-	94,28%	100%	73,33%	73,33%	Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kinerja
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.000.000,-	324.327.700,-	94,28%	15 unit	11 unit	73,33%	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan kantor
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.388.600,-	247.073.700,-	92,74%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,-	9.899.000,-	98,99%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.075.000,-	54.917.507,-	75,15%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	c. Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	183.313.600	182.257.200	99,42%	12 Lap	12 Lap	100 %	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan umum kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.860.000,-	158.458.099,-	99,98%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	18.200.000,-	18.181.000,-	99,90%	5 Unit	5 Unit	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.260.000,-	71.898.000,-	99,50%	2 unit	2 unit	99,89%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	35.340.000,-	35.330.099,-	99,97%	15 unit	15 unit	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.060.000	33.049.193	99,97%	1 Unit	1 Unit	100 %	Terlaksananya perbaikan Gedung kantor
II.	Program Pendaftaran Penduduk	241.522.000,-	241.403.420,-	99,95%	Penerbitan KTP-el = 98%	Penerbitan KTP-el = 94,38 %	Penerbitan KTP-el=96,31 %	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
					Penerbitan KIA = 36%	Penerbitan KIA = 54,64%	Penerbitan KIA= 151,77%	
	1. Penataan Pendaftaran Penduduk	44.562.000,-	44.448.420,-	99,75%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk
	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,	44.562.000	44.448.420,-	99,75%	3 Dok	3 Dok	100 %	Tersedianya dokumen kependudukan selain blanko KTP-

	Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk							El, formular dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebututhan
	3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	196.960.000,-	196.955.000	99,99%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	196.960.000,-	196.955.000	99,99%	1 Dok	1 Dok	100%	Penerbitan Dokumen Kependudukan
III.	Program Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-	99,48%	94,5 %	98,27 %	103,99%	Meningkatnya Penerbitan Dokumen pencatatan Sipil
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-	99,48%	100%	100%	100%	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil
	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	41.640.000,-	41.425.400,-	99,48%	3 Lap	3 Lap	100 %	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	49.829.000,--	49.199.387,-	98,73%	88,46%	62,96%	71,17%	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
	1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.825.000,--	20.470.387,-	98,29%	100%	100%	100%	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	20.825.000,--	20.470.387,-	98,30%	2 Lap	2 Lap	100%	Tersedianya laporan Agregat Kependudukan
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.374.000,-	37.223.000,-	99,59%	100%	81,48%	81,48%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	17.374.000,-	17.316.000,-	99,67%	12 lap	12 lap	100%	Tersedianya Laporan Penggunaan Aplikasi SIAK pada pelayanan Dokumen kependudukan

	b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20.000.000	19.907.000	99,54%	27 PKS	17 PKS	62,96%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	11.630.000	11.412.400	98,13%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya persentase pemenuhan data profil kependudukan
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	11.630.000	11.412.400	98,13%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya dan tersusunnya data profil kependudukan
	a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	11.630.000	11.412.400	98,13%	1 Dok	1 Dok	100 %	Tersedianya data kependudukan kabupaten/kota
	JUMLAH	3.867.181.000,-	3.668.612.855,-	94,87%	100%	99,82%	99,82%	

Sumber : Laporan RFK Disdukpencahil Tahun 2024

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan terdapat beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelayanan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk alamiah dan mutasi penduduk yang berakibat pada petugas pendata ditingkat desa tidak melaporkan peristiwa tersebut.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti identitas diri.
4. Masih kurangnya Petugas pelayanan, Operator computer dan petugas verifikasi yang berstatus sebagai PNS.
5. Dukungan Dana belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan keliling ataupun jemput bola di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan
6. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik di bagian secretariat maupun di bagian pelayanan terutama bila ada kegiatan dinas dilapangan yaitu jemput bola
7. Dukungan dana yang belum memadai untuk pelatihan bagi SDM
8. Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja tidak seimbang.
9. Jenis pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.
10. Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum semua diupdate untuk pelayanan disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
11. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai akibat keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana pendukung maupun sarana pelayanan.

12. Adanya penambahan persyaratan berupa sertifikat ISO dari Kementrian Dalam Negeri bagi OPD yang akan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan sementara belum ada OPD di Kabupaten Kepulauan yang memiliki Sertifikat ISO.
13. SIAK terdistribusi yang beralih menjadi SIAK terpusat sehingga pengolahan data untuk kepentingan pelaporan menjadi terhambat.
14. Terkait kendala system (Gangguan Jaringan dan koneksi internet dan gangguan teknis pada aplikasi siak).

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja kegiatan sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut diatas, maka upaya/solusi untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan anggaran baik untuk pengadaan sarana dan prasarana maupun untuk pelaksanaan pelayanan keliling di Kecamatan daratan maupun di Kecamatan Kepulauan
2. Peningkatan pelayanan keliling administrasi kependudukan ke desa-desa terpencil sehingga dapat memenuhi pencapaian target RPJMD maupun target nasional.
3. Perlu adanya perekrutan pegawai untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan penerbitan dokumen kependudukan.
5. Perlu diadakan pelatihan bagi SDM Pelayanan Adminduk.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung maupun Sarana dan Prasarana Pelayanan.
7. Koordinasi yang lebih intens dengan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil terkait Persyaratan Perjanjian Kerjasama dan hal-hal lain menyangkut adminduk.

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, akhirnya dengan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Pemerintah dan format laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami harap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur dan perbandingan sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, semoga segala upaya baik selalu mendapat ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**


Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670905 199811 1 003

KEPALA DINAS/ESELON II

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah						
Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	%	72,6	73,6	74,6	75,6	76,6
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	66,74	67,69	69,82	72,45	75,04
Laporan Keuangan perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai



SEKRETARIS/ ESELON III

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Disdukpcapil						
Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian kinerja	%	63,03	70,28	70,53	71,51	72,31
Persentase capaian kinerja keuangan	%	83	85	88	91	95



KASUBAG/ESELON IV

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang transparan dan Akuntabel	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA DINAS/ESELON II

2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten						
Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	%	88,46	94,23	77,33	95	100

KEPALA BIDANG/ESELON III

Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah Jumlah OPD atau Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan berbasis NIK						
Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	57,69	76,92	88,46	100	100

Program : Pengelolaan Profil Kependudukan						
Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan data kependudukan						
Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	100	100

PEJABAT FUNGSIONAL/ESELON IV

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan	100%	0%	0%	100%	100%
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang diawasi dan dibina	0%	0%	0%	100%	100%

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Data Profil Kependudukan yang Tersusun	100%	100%	100%	100%	100%

CASCADING
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KABUPATEN



OPD

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah						
Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	55	64	68	73	76

KEPALA DINAS/ESELON II

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1. Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan						
Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan	%	74,33	75,83	76,17	77,33	78,5

KEPALA BIDANG/ESELON III

Program : Pendaftaran Penduduk						
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki identitas kependudukan						
Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Penerbitan KTP-El	%	97	97	98	99	100
Persentase Penerbitan KIA	%	32	35	36	37	40

Program : Pencatatan sipil						
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki akta pencatatan sipil						
Indikator Program	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Persentase penerbitan akta pencatatan sipil	%	93,75	94	94,50	95	95,50

PEJABAT FUNGSIONAL/KASUBAG/ESELON IV

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%

Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan akta pencatatan sipil	94%	94,5%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0%	0%	0%	100%	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan pengawasan terhadap Peningkatan capaian Pencatatan	0%	0%	0%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9								10	11	12	13				
			- Penyediaan Komponen Instalasi/ Listrik Penerangan	- Jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	6 Paket	Pendataan balon lampu, kabel dan alat listrik lainnya yang kondisi rusak Konsultasi ke rekanan (toko listrik) Pembelian balon lampu, kabel dan alat listrik lainnya Pemasangan balon lampu, kabel dan alat listrik lainnya	4.000.000	-	-	1paket	-	-	1paket	-	-	-	-	-	2 paket	100%			
			- Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan	6 Paket	Pendataan spanduk yang akan dicetak Konsultasi ke rekanan (percetakan) Pencetakan spanduk Pemasangan spanduk Pendataan banner yang akan dicetak Konsultasi ke rekanan (percetakan) Pencetakan banner Pemasangan banner Pendataan karangan bunga yang akan dicetak Konsultasi ke rekanan (percetakan) Pembuatan karangan bunga Pemasangan karangan bunga	8.780.000	-	-	1paket	-	-	1paket	1paket	-	-	-	-	-	3 paket	100%		
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dok	Edisi Koran terbit setiap b Koran diserahkan ke kadis Membayar langganan koran	7.120.000	-	-	1 dok	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	2 Dok	100%			
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	Menerima undangan rapat koordinasi dari propinsi dan pusat Agenda surat masuk lembar disposisi dan dimasukkan ke kepala dinas Memberi nomor surat tugas Membuat surat tugas yang ditandatangani oleh Bupati/kepala dinas Memberi nomor surat perjalanan dinas (SPD) yang ditandatangani oleh kepala dinas Membuat surat perjalanan dinas (SPD) yang ditandatangani oleh kepala dinas	200.000.000	-	-	12 lap	12 lap	12 lqp	13 lap	-	-	-	-	-	49 Lap	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9								10	11	12	13		
	(PIAK) dan pemanfaatan data			- Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - Pengolahan dan Penyajian Data Agregat Kependudukan	88,46 %																
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100 %		20.825.000														
			- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Penyusunan Laporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	1 Dok	Membuat Surat Permintaan Proses e-Purchasing ke UKPBLJ Kab. Kep Belayar.	20.825.000	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	-	-	25%	1 Dok	100%
						Membuat Permohonan Pengeluaran Barang dari Gudang.															
						Penyerahan ATK oleh Pengurus Barang Kepada Staf Bidang PIAK untuk dipergunakan															
						Menyusun Rencana Kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.															
						Menyerahkan Rencana Kerja Bidang PIAK ke Kasubeg. Perencanaan.															
						Koordinasi, Konsultasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk ke Desa dan Kelurahan															
						Melaporkan kepada Kadis hasil pemantauan di Desa dan Kelurahan.															
						Membuat Surat Tugas.															
						Membuat Surat Perjalanan Dinas.															
						Membuat Rincian Biaya Perjalanan Dinas.															
						Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas.															
						Mengarsipkan surat-surat terkait pelaporan bulanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dari desa dan kecamatan															
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	100%		37.374.000														
			- Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Penggunaan Aplikasi SIAK dalam Pelayanan	2 Laporan	Rapat tim untuk persiapan pelaksanaan kegiatan	17.374.000	2 Lap	24 Lap	100%											

Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan SIPD Kemendagri

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
			Lokasi	Target 2024		Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif				
				Semula	Menjadi	Renja 2024	Renja 2024 Perubahan								
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kab. Kepulauan Selayar			3,701,593,800	3,901,593,800		-		5,106,159,277			
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	Kab. Kepulauan Selayar	70,28 %	70,28 %	3,545,562,800	3,548,602,800	APBD	-	86%	4,563,524,492		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan		85 %	85 %								
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	46,512,000	46,512,000	APBD	-	100%	484,000,000	
2	12	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	3 Dokumen	3 Dokumen	12,262,000	12,262,000	APBD	-	3 Dokumen	50,000,000
2	12	1	2.01	02	Kordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	1 Dokumen	5,000,000
2	12	01	2.01	03	Kordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	1 Dokumen	5,000,000
2	12	01	2.01	04	Kordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	1 Dokumen	-
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	1 Dokumen	-
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan realisasi Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporann hasil koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	3 Laporan	3 Laporan	6,250,000	6,250,000	APBD	-	3 Laporan	27,000,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	3 Laporan	3 Laporan	8,000,000	8,000,000	APBD	-	3 Laporan	397,000,000

2	12	01	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan keuangan yang disusun secara tepat, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	2,483,047,200	2,483,047,200	APBD	-	100%	2,679,849,967
2	12	01	2:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Kepulauan Selayar	25 Orang/bulan	25 Orang/Bulan	2,447,693,800	2,447,693,800	APBD	-	32 orang	2,539,849,967
2	12	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Pelayanan Administrasi	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	9 orang	75,000,000
2	12	01	2:02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	-	-
2	12	01	2:02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Laporan	8,135,400	8,135,400	APBD	-	1 Dokumen	5,000,000
2	12	01	2:02	06	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	1 Dokumen	5,000,000
2	12	01	2:02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Laporan	12 laporan	12,218,000	12,218,000	APBD	-	12 Laporan	40,000,000
2	12	01	2:02	08	Penyusunan, pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	12 Laporan	15,000,000
2	12	01	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah sebagai penunjang pelayanan	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	APBD	-	100%	36,600,000
2	12	1	02.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaa Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	2 Dokumen	5,000,000
2	12	01	2:03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan rekonsiliasi dan penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	4 laporan	4 laporan	5,000,000	5,000,000	APBD	-	4 Laporan	26,600,000
2	12	1	02.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengimputan Barang Milik Daerah ke Aplikasi BMD	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	1 Laporan	5,000,000
2	12	01	2:05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawalan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	APBD	-	100%	162,000,000
2	12	01	2:05	03	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	APBD	-	12 Laporan	37,000,000
2	12	01	2:05	05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	1 Dokumen	5,000,000

2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	10 orang	50,000,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	40 Orang	70,000,000
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum perkantoran sebagai pendukung pelayanan	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	219,900,000	219,900,000	APBD	-	100 %	609,720,775
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	6 paket	6 paket	4,000,000	4,000,000	APBD	-	6 Jenis	4,000,000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	5 jenis	264,400,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	6 paket	6 paket	8,780,000	8,780,000	APBD	-	8 jenis	8,000,000
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	6 dokumen	6 dokumen	7,120,000	7,120,000	APBD	-	6 Jenis	10,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	150 Laporan	150 Laporan	200,000,000	200,000,000	APBD	-	175 Laporan	323,320,775
2	12	01	02.13		Penataan Organisasi	Persentase Pentaan Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	100%	10,000,000
2	12	01	02.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1. Jumlah Dokumen Analisis jabatan yang disusun	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	1 Laporan	10,000,000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan fasilitas yang mendukung kinerja	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	344,000,000	344,000,000	APBD	-	100%	290,000,000
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	3 unit	65,000,000
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan (Meja, Kursi dan Lemari)	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	8 unit	25,000,000
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	11 unit	11 unit	344,000,000	344,000,000	APBD	-	15 unit	200,000,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	284,463,600	287,503,600	APBD	-	3 Unit	146,353,750
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab. Kepulauan Selayar	12 laporan	12 laporan	10,000,000	10,000,000	APBD	-	20 jenis	34,728,750

2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	12 laporan	12 laporan	89,750,000	92,790,000	APBD	-	3 jenis	86,625,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Gaji PHL dan BPJS Ketenagakerjaan)	Kab. Kepulauan Selayar	12 laporan	12 laporan	184,713,600	184,713,600	APBD	-	4 jenis	25,000,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	157,640,000	157,640,000	APBD	-	100%	145,000,000
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	14 unit	14 unit	18,200,000	18,200,000	APBD	-	17 unit	40,000,000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	2 unit	2 unit	72,260,000	72,260,000	APBD	-	2 Unit	45,000,000
2	12	01	02.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	17 buah	5,000,000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	15 unit	15 unit	34,120,000	34,120,000	APBD	-	18 unit	15,000,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 unit	1 unit	33,060,000	33,060,000	APBD	-	1 Unit	40,000,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Penerbitan KTP-el	Kab. Kepulauan Selayar	97 %	97 %	44,562,000	241,522,000	APBD	-	98%	291,533,198
						2. Persentase Penerbitan kartu Identitas Anak (KIA)		35 %	35 %				-	35%	
2	12	02	2.01		Pelayanan pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan layanan pendaftaran penduduk	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	-	-	APBD	-	100 %	291,533,198
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	2 jenis layanan	22,830,039
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah Dokumen pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	9200 KK 3350 KTP 1700 KIA	243,103,159
2	12	02	02.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen SKPWNI yang dicatat san diterbitkan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	1800 PD	25,600,000
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan penataan pendaftaran penduduk	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	44,562,000	44,562,000	APBD	-	100%	-

2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Kab. Kepulauan Selayar	2 Dokumen	2 Dokumen	44,562,000	44,562,000	APBD	-	-	-
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peningkatan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	-	196,960,000	APBD	-	100%	-
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	-	1 Dokumen	-	196,960,000	APBD	-	-	-
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Kab. Kepulauan Selayar	94 %	94 %	41,640,000	41,640,000	APBD	-	94,5%	148,958,568
2	12	03	2.01		Pelayanan pencatatan Sipil	Persentase peningkatan layanan Pencatatan Sipil	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	41,640,000	41,640,000	APBD	-	100%	127,958,568
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	4125 kutipan	127,958,568
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Kab. Kepulauan Selayar	100%	1 Dokumen	41,640,000	41,640,000	APBD	-	-	-
2	12	03	2.02		Penyelenggara Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	100%	21,000,000
2	12	03	2.02	04	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	400 kutipan	21,000,000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Kab. Kepulauan Selayar	76,92 %	76,92 %	58,199,000	58,199,000	APBD	-	88,46 %	86,183,172
2	12	04	2.01		Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	100%	28,500,000
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	2 Laporan	28,500,000
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	100 %	100 %	20,825,000	20,825,000	APBD	-	100%	16,683,172

2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	20,825,000	20,825,000	APBD	-	1 Laporan	16,683,172
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang di selenggarakan	Kab. Kepulauan Selayar	100%	100%	37,374,000	37,374,000	APBD	-	100%	41,000,000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	2 Laporan	2 Laporan	17,374,000	17,374,000	APBD	-	12 Laporan	41,000,000
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	7 Dokumen	7 dokumen	20,000,000	20,000,000	APBD	-	-	-
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data profil kependudukan	Kab. Kepulauan Selayar	100%	100%	11,630,000	11,630,000	APBD	-	100%	15,959,847
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Data Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Kepulauan Selayar	100%	100%	11,630,000	11,630,000	APBD	-	100%	15,959,847
2	12	05	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	APBD	-	30 jenis data	15,959,847
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil data perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	11,630,000	11,630,000	APBD	-		-

Benteng, Agustus 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M. M

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670905 198811 1 003